

**Pengelolaan Persediaan Barang Habis Pakai dalam Mendukung Efektivitas
Penatausahaan pada BPPKAD Kabupaten Ponorogo**

Sandria Bunga Devianti¹, Nurul Hidayah²

Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Email: sandriabungadevianti@gmail.com¹, nurul_h@umpo.ac.id²

ABSTRACT

Abstract This study aims to examine the management of consumable inventory in relation to the effectiveness of inventory administration at the Regional Revenue, Financial Management, and Asset Agency (BPPKAD) of Ponorogo Regency. Consumable inventory constitutes a component of local government current assets and plays a strategic role in supporting administrative operations and public service delivery. This research employs a qualitative descriptive method with a case study approach. Data were collected through document analysis, observation, and limited interviews with parties involved in inventory management. The findings indicate that the management of consumable inventory at BPPKAD of Ponorogo Regency has generally been implemented in accordance with prevailing regional financial management regulations. However, several administrative constraints remain, including an inadequately integrated recording system, delays in data updating, and suboptimal implementation of internal control at the inventory administration stage. These conditions adversely affect the accuracy of inventory data and the effectiveness of reporting. Based on these findings, the study recommends strengthening a digital-based inventory recording system, enhancing interdepartmental coordination, and reinforcing supervisory mechanisms to improve the accountability and effectiveness of consumable inventory administration.

Keywords: *consumable inventory; inventory administration; accountability; public sector.*

ABSTRAK

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan persediaan barang habis pakai dalam kaitannya dengan efektivitas penatausahaan pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Ponorogo. Persediaan barang habis pakai merupakan bagian dari aset lancar pemerintah daerah yang berperan strategis dalam mendukung kelancaran administrasi dan pelayanan publik. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data meliputi studi dokumentasi, observasi, dan wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan persediaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan persediaan barang habis pakai di BPPKAD Kabupaten Ponorogo pada prinsipnya telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan daerah. Namun demikian, masih terdapat kendala administratif, antara lain sistem pencatatan yang belum terintegrasi secara optimal, keterlambatan pembaruan data, serta belum optimalnya penerapan pengendalian internal pada tahap penatausahaan. Kendala tersebut berdampak pada menurunnya tingkat akurasi data persediaan dan efektivitas pelaporan. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan penguatan sistem pencatatan persediaan berbasis

digital, peningkatan koordinasi antarbidang, serta penguatan mekanisme pengawasan untuk meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas penatausahaan persediaan barang habis pakai.

Kata Kunci: persediaan barang habis pakai; penatausahaan; akuntabilitas; sektor publik.

1. PENDAHULUAN

Pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu unsur strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berperan penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan efisien menuntut penerapan prinsip akuntabilitas, transparansi, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Prinsip-prinsip tersebut menjadi landasan utama dalam memastikan bahwa setiap penggunaan sumber daya publik dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat serta mampu mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah. Dalam konteks pengelolaan keuangan daerah, aset daerah merupakan salah satu komponen penting yang harus dikelola secara optimal. Aset daerah tidak hanya mencakup aset tetap bernilai besar, tetapi juga aset lancar seperti persediaan, termasuk persediaan barang habis pakai. Persediaan barang habis pakai meliputi berbagai kebutuhan operasional rutin, seperti alat tulis kantor, perlengkapan administrasi, dan bahan pendukung lainnya yang digunakan secara terus-menerus dalam pelaksanaan tugas pemerintahan. Meskipun secara nominal nilai persediaan barang habis pakai relatif kecil, intensitas penggunaannya yang tinggi menjadikan pengelolaan persediaan ini memiliki tingkat risiko yang cukup signifikan apabila tidak ditatausahakan dengan baik.

Pengelolaan dan penatausahaan persediaan barang habis pakai yang tidak tertib berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan, seperti ketidaksesuaian antara pencatatan dan kondisi fisik, keterlambatan penyajian laporan, serta lemahnya pengendalian internal. Kondisi tersebut tidak hanya berdampak pada efektivitas operasional perangkat daerah, tetapi juga dapat memengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah secara keseluruhan. Oleh karena itu, diperlukan sistem pengelolaan persediaan yang sistematis, terintegrasi, dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan agar informasi yang dihasilkan akurat, andal, dan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan.

Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Ponorogo merupakan perangkat daerah yang memiliki peran sentral dalam pengelolaan pendapatan, keuangan, dan aset daerah. Sebagai instansi yang bertanggung jawab dalam pengelolaan aset daerah, BPPKAD dituntut untuk memastikan bahwa seluruh proses pengelolaan dan penatausahaan aset, termasuk persediaan barang habis pakai, dilaksanakan secara tertib administrasi, transparan, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun demikian, dalam praktiknya, pengelolaan persediaan barang habis pakai masih menghadapi berbagai tantangan yang berpotensi menghambat efektivitas penatausahaan dan pengendalian aset.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini difokuskan pada analisis pengelolaan persediaan barang habis pakai dalam mendukung efektivitas penatausahaan pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Ponorogo. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai praktik pengelolaan persediaan yang diterapkan, mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi, serta memberikan rekomendasi perbaikan guna meningkatkan akuntabilitas dan kualitas pengelolaan keuangan daerah.

2. KAJIAN LITERATUR

Persediaan Barang Habis Pakai dalam Sektor Publik

Persediaan barang habis pakai merupakan bagian dari aset lancar pemerintah daerah yang digunakan untuk menunjang aktivitas operasional dan pelayanan publik. Dalam sektor publik, persediaan memiliki peran strategis karena berkaitan langsung dengan kelancaran administrasi pemerintahan dan kualitas pelayanan kepada masyarakat (Mardiasmo, 2018). Pengelolaan persediaan barang habis pakai harus dilakukan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan agar informasi keuangan yang dihasilkan andal dan dapat dipertanggungjawabkan (Republik Indonesia, 2010). Penelitian empiris menunjukkan bahwa penerapan akuntansi persediaan yang tertib sesuai SAP berpengaruh terhadap keakuratan pencatatan dan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Tombuku & Manaroinsong, 2022). Selain aspek pencatatan, pengelolaan persediaan barang habis pakai juga mencakup perencanaan, pengadaan, penyimpanan, dan pendistribusian. Ketidaktertiban dalam pengelolaan persediaan berpotensi menimbulkan pemborosan anggaran dan ketidaksesuaian antara data administrasi dengan kondisi fisik persediaan (Rosalin et al., 2023).

Penatausahaan Persediaan

Penatausahaan persediaan merupakan bagian penting dari sistem pengelolaan keuangan daerah yang bertujuan untuk menjamin tertib administrasi dan akuntabilitas pengelolaan aset. Penatausahaan meliputi kegiatan pencatatan, pengklasifikasian, dan pelaporan persediaan secara sistematis dan berkelanjutan sesuai dengan ketentuan akuntansi pemerintahan (Republik Indonesia, 2010). Penatausahaan persediaan yang baik akan menghasilkan informasi yang akurat dan tepat waktu sehingga mendukung penyusunan laporan keuangan yang berkualitas. Penelitian Tombuku dan Manaroinsong (2022) menemukan bahwa kelemahan dalam penatausahaan persediaan dapat berdampak pada ketidakakuratan nilai persediaan dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Selain itu, efektivitas penatausahaan persediaan juga dipengaruhi oleh kompetensi sumber daya manusia yang terlibat dalam proses administrasi persediaan. Pegawai yang memiliki kompetensi memadai cenderung mampu melaksanakan penatausahaan persediaan secara lebih tertib dan akuntabel (Sedarmayanti & Elianie, 2021).

Efektivitas Penatausahaan Persediaan

Efektivitas penatausahaan persediaan dapat diartikan sebagai tingkat keberhasilan proses penatausahaan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, yaitu tersedianya informasi persediaan yang akurat, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Efektivitas ini tercermin dari kesesuaian antara data administrasi dengan kondisi fisik persediaan serta ketepatan waktu pelaporan (Sedarmayanti & Elianie, 2021). Pemanfaatan sistem informasi akuntansi persediaan terbukti mampu meningkatkan efektivitas penatausahaan dengan mempercepat proses pencatatan dan meminimalkan kesalahan administrasi (Fitriana et al., 2021). Sistem pencatatan yang terintegrasi juga mempermudah koordinasi antarunit kerja dalam penyusunan laporan persediaan.

Lebih lanjut, penerapan prinsip efisiensi dalam pengelolaan persediaan, seperti adaptasi konsep manajemen persediaan modern di sektor publik, dapat mendukung efektivitas penatausahaan dan pengendalian penggunaan barang habis pakai (Tafriji & Azhari, 2021).

Sistem Pengendalian Internal dalam Pengelolaan Persediaan

Sistem pengendalian internal merupakan proses yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi, termasuk keandalan pelaporan keuangan dan pengamanan aset daerah. Dalam konteks pemerintahan, pengendalian internal diatur melalui Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang terdiri atas lima unsur utama (Republik Indonesia, 2008). Penerapan pengendalian internal yang efektif dalam pengelolaan persediaan dapat meminimalkan risiko kesalahan pencatatan, kehilangan barang, dan penyalahgunaan aset. Penelitian Aning Widiretno dan Ratama (2022) menunjukkan bahwa unsur pengendalian internal, seperti pemisahan fungsi dan pengawasan berkala, berpengaruh signifikan terhadap tertibnya pengelolaan persediaan barang habis pakai. Selain itu, dukungan teknologi informasi dan sistem pengendalian internal secara simultan berkontribusi terhadap peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, termasuk dalam pengelolaan dan penatausahaan persediaan (Putri, 2023).

3. PELAKSAAAN DAN METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Ponorogo. Pendekatan ini digunakan untuk memperoleh gambaran secara mendalam mengenai pengelolaan dan penatausahaan persediaan barang habis pakai yang dilaksanakan pada organisasi perangkat daerah. Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi langsung dan wawancara terbatas dengan pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan persediaan, seperti pengurus persediaan dan pejabat penatausahaan barang. Data sekunder diperoleh melalui studi dokumentasi, meliputi laporan persediaan, kartu persediaan, serta dokumen administrasi dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan barang milik daerah.

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk memperoleh data yang relevan dan mendukung tujuan penelitian. Observasi digunakan untuk mengamati proses pengelolaan dan pencatatan persediaan barang habis pakai, sedangkan wawancara dilakukan untuk menggali informasi terkait pelaksanaan penatausahaan dan kendala yang dihadapi. Dokumentasi digunakan sebagai data pendukung untuk memperkuat hasil observasi dan wawancara. Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data yang telah dianalisis selanjutnya dibandingkan dengan ketentuan serta prinsip pengelolaan keuangan daerah yang berlaku untuk menilai efektivitas penatausahaan persediaan barang habis pakai di BPPKAD Kabupaten Ponorogo.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan persediaan barang habis pakai di BPPKAD Kabupaten Ponorogo telah dilaksanakan melalui tahapan perencanaan kebutuhan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, penggunaan, pencatatan, dan pelaporan persediaan. Secara prosedural, tahapan tersebut telah mengacu pada ketentuan pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan barang milik daerah yang berlaku. Pada tahap perencanaan kebutuhan, penentuan jenis dan jumlah persediaan barang habis pakai dilakukan berdasarkan kebutuhan operasional masing-masing bidang. Proses pengadaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa pemerintah, sedangkan penerimaan dan penyimpanan persediaan dilakukan

dengan dukungan dokumen administrasi yang sah. Namun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa sistem pencatatan persediaan yang digunakan belum sepenuhnya terintegrasi antarbidang. Kondisi ini menyebabkan pembaruan data persediaan tidak selalu dilakukan secara tepat waktu, sehingga masih berpotensi menimbulkan perbedaan antara data administrasi dan kondisi fisik persediaan.

Ditinjau dari aspek pengendalian internal, pengawasan terhadap penggunaan persediaan barang habis pakai masih bersifat administratif dan belum didukung oleh pengawasan fisik yang dilakukan secara rutin dan sistematis. Akibatnya, efektivitas penatausahaan persediaan belum sepenuhnya optimal, terutama dalam menjamin keakuratan data dan ketepatan waktu pelaporan.

Pembahasan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara normatif pengelolaan persediaan barang habis pakai di BPPKAD Kabupaten Ponorogo telah memenuhi tahapan pengelolaan persediaan sebagaimana dikemukakan dalam teori pengelolaan keuangan sektor publik. Hal ini sejalan dengan pendapat Mardiasmo (2018) yang menyatakan bahwa pengelolaan persediaan dalam sektor publik harus mencakup proses perencanaan, pengadaan, penyimpanan, penggunaan, serta penatausahaan yang tertib dan berkelanjutan.

Persediaan Barang Habis Pakai (BHP) merupakan fokus utama dalam penelitian ini karena memiliki karakteristik penggunaan yang tinggi, bernilai relatif kecil per unit, namun berdampak signifikan terhadap kelancaran administrasi pemerintahan. Dalam konteks sektor publik, BHP tidak hanya dipandang sebagai komponen aset lancar, tetapi juga sebagai instrumen pendukung utama penyelenggaraan pelayanan publik yang berkesinambungan. Tingginya frekuensi pengadaan dan penggunaan BHP menyebabkan risiko ketidaktertiban administrasi menjadi lebih besar apabila tidak didukung oleh perencanaan yang matang, sistem pencatatan yang terintegrasi, serta pengendalian internal yang memadai. Oleh karena itu, pengelolaan BHP memerlukan perhatian khusus dibandingkan dengan jenis aset lainnya.

Meskipun demikian, temuan mengenai belum terintegrasinya sistem pencatatan persediaan menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan normatif dan praktik di lapangan. Kondisi ini berpotensi menurunkan efektivitas penatausahaan persediaan karena informasi yang dihasilkan belum sepenuhnya akurat dan mutakhir. Temuan ini sejalan dengan penelitian Tombuku dan Manaroinsong (2022) yang menyatakan bahwa kelemahan dalam penatausahaan persediaan dapat berdampak pada rendahnya kualitas informasi persediaan dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Selain itu, lemahnya koordinasi antarbidang dalam pembaruan dan pelaporan data persediaan mencerminkan belum optimalnya unsur informasi dan komunikasi dalam sistem pengendalian internal. Berdasarkan kerangka Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), informasi dan komunikasi yang efektif merupakan unsur penting untuk memastikan bahwa informasi yang relevan dapat disampaikan secara tepat waktu kepada pihak yang membutuhkan (Republik Indonesia, 2008).

Dari aspek pengendalian internal, pengawasan yang masih bersifat administratif menunjukkan bahwa unsur kegiatan pengendalian dan pemantauan belum berjalan secara optimal. Idealnya, pengendalian internal dalam pengelolaan persediaan tidak hanya mencakup pemeriksaan dokumen, tetapi juga pengawasan fisik secara berkala serta pemisahan fungsi yang jelas. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Aning Widiretno dan Ratama (2022) yang menegaskan bahwa

penerapan pengendalian internal yang memadai berpengaruh terhadap tertibnya pengelolaan persediaan barang habis pakai.

Dengan demikian, hasil penelitian ini menegaskan bahwa efektivitas penatausahaan persediaan barang habis pakai tidak hanya ditentukan oleh kepatuhan terhadap prosedur, tetapi juga oleh dukungan sistem pencatatan yang terintegrasi serta penerapan sistem pengendalian internal yang efektif. Perbaikan pada aspek-aspek tersebut menjadi prasyarat penting dalam meningkatkan akuntabilitas dan kualitas pengelolaan persediaan di lingkungan pemerintah daerah.

Tabel 1. Alur Perencanaan dan Pengadaan Barang Habis Pakai (BHP)

Tahap	Uraian Kegiatan	Pihak Terkait	Dokumen Pendukung
Perencanaan Kebutuhan	Identifikasi kebutuhan BHP	Unit Kerja	RKBU
Pengajuan Usulan	Pengajuan kebutuhan BHP	Unit Kerja, Pengurus Persediaan	Nota Dinas
Verifikasi & Penganggaran	Penyesuaian dengan anggaran	Pengelola Keuangan	DPA, APBD
Pengadaan	Pelaksanaan pengadaan	Pejabat Pengadaan	Dokumen Pengadaan
Penerimaan	Pemeriksaan fisik & administrasi	Pengurus Persediaan	BAST
Penyimpanan	Penempatan barang	Pengurus Persediaan	Kartu Persediaan
Penggunaan	Distribusi operasional	Unit Kerja	Bukti Pengeluaran
Pencatatan & Pelaporan	Pencatatan & pelaporan	Pengurus Persediaan	Laporan Persediaan

Alur perencanaan dan pengadaan persediaan barang habis pakai tersebut diperoleh berdasarkan hasil wawancara dengan pengurus persediaan dan pejabat penatausahaan barang, studi dokumentasi terhadap standar operasional prosedur (SOP) pengelolaan barang milik daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan keuangan daerah dan pengadaan barang/jasa pemerintah. Dalam sektor publik, pengadaan persediaan barang habis pakai didanai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dialokasikan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) masing-masing perangkat daerah. Setiap pengajuan, penggunaan, dan pertanggungjawaban dana dilakukan melalui mekanisme yang telah ditetapkan sebagai bentuk akuntabilitas penggunaan dana publik.

5. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan persediaan barang habis pakai di BPPKAD Kabupaten Ponorogo secara normatif telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan daerah, meliputi tahapan perencanaan kebutuhan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, penggunaan, pencatatan, dan pelaporan. Namun demikian, efektivitas penatausahaan persediaan belum sepenuhnya optimal, yang ditunjukkan oleh belum terintegrasinya sistem pencatatan antarbidang, keterlambatan pembaruan data persediaan, serta penerapan pengendalian internal yang masih bersifat

administratif dan belum didukung oleh pengawasan fisik yang rutin. Kondisi tersebut berdampak pada menurunnya tingkat akurasi data persediaan dan ketepatan waktu pelaporan. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan penerapan sistem pencatatan persediaan berbasis digital yang terintegrasi antarbidang, penyusunan dan penegakan prosedur operasional standar yang lebih konsisten, peningkatan koordinasi dan kompetensi sumber daya manusia yang terlibat dalam penatausahaan persediaan, serta penguatan mekanisme pengendalian internal melalui pengawasan fisik dan evaluasi berkala guna meningkatkan efektivitas penatausahaan dan akuntabilitas pengelolaan persediaan barang habis pakai.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Ponorogo atas dukungan dan izin yang diberikan sehingga penelitian ini dapat dilaksanakan dengan baik. Penulis juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam proses pengumpulan data serta kepada pihak-pihak yang telah memberikan arahan dan masukan selama penyusunan artikel ini. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan pengelolaan dan penatausahaan persediaan barang habis pakai di lingkungan pemerintah daerah.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Aning Widiretno, A., & Ratama, G. K. (2022). Analisis penerapan unsur pengendalian internal dalam pengelolaan persediaan barang habis pakai pada instansi pemerintah. *Jurnal Akuntansi Manajemen dan Pemerintahan (JAMPK)*, 5(2), 112–124.
- Fitriana, S., Hidayati, N., & Prasetyo, A. (2021). Evaluasi sistem pengendalian internal pada sistem informasi akuntansi persediaan barang habis pakai. *Jurnal GeoEkonomi*, 12(2), 155–168. <https://doi.org/10.36277/geoekonomi.v12i2.461>
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi sektor publik*. Yogyakarta: Andi.
- Putri, A. S. (2023). Government performance accountability: The role of information technology and internal control systems. *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*, 27(1), 45–60. <https://doi.org/10.20885/jaai.vol27.iss1.art4>
- Republik Indonesia. (2008). Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Jakarta.
- Republik Indonesia. (2010). Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Jakarta.
- Rosalin, G. M., Sari, D. P., & Yuliana, R. (2023). Pengelolaan persediaan barang habis pakai berbasis sistem informasi untuk menjaga kesesuaian kuantitas. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 8(3), 401–414. <https://doi.org/10.14710/jiip.v8i3.5265>
- Sedarmayanti, & Elianie, E. L. (2021). Pengaruh kompetensi pegawai terhadap efektivitas penatausahaan barang persediaan. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 18(1), 88–99.
- Tafriji, A., & Azhari, H. (2021). Implementasi manajemen persediaan just-in-time dalam sektor publik. *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara*, 3(1), 65–78.
- Tombuku, T., & Manaroinson, J. (2022). Analisis penerapan akuntansi persediaan barang habis pakai pada pemerintah daerah. *Jurnal Akuntansi Indonesia*, 11(2), 137–149.